

DINAMIKA PERAN ELITE LOKAL PASCA ORDE BARU: Studi Kasus di Sumbawa*

Oleh Septi Satriani, S.Ip

Abstract

This study is to describe the role of local aristocracy and various factors that bring about inability of the aristocracy to redefine their roles and existence while in area of Indonesia; local aristocrats are able to do so. This study also examines impact of changes and continuity of the role of the aristocracy towards local democracy in Sumbawa.

Pengantar

Ada perdebatan panjang dalam ilmu politik mengenai mana yang lebih penting dalam menentukan kebijakan dan tindakan dalam suatu sistem, apakah lebih penting struktur yang mbingkai dan mengarahkan tindakan tokoh-tokoh yang berada di dalamnya sehingga suatu struktur tertentu akan menghasilkan perilaku tertentu, atau justru yang lebih menentukan adalah peranan “agency” atau karakter dan perilaku tokoh-tokoh kunci yang mewarnai setiap kebijakan strategis.¹ Berangkat dari perdebatan inilah kajian ini ingin melihat bahwa dinamika yang terjadi dalam peran elite lokal di Sumbawa khususnya bangsawan tidak lepas dari hubungan timbal balik yang terjadi antara perubahan struktur² maupun perubahan polah tingkah aktor sebagai manifestasi terhadap perubahan tersebut.

Ketika struktur Kerajaan Sumbawa di bawah kekuasaan Kerajaan Gowa pada tahun 1623³

¹ Dewi Fortuna Anwar, “Demokrasi Lokal: Peran Aktor Dalam Mendorong dan Menghambat Demokratisasi” dalam R. Siti Zuhro (Ed.), *Peran Aktor dalam Demokratisasi*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. xvii.

² Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan struktur dibahas lebih jauh dalam pendekatan yang digunakan sebagai pisau analisis dalam kajian ini.

³ Dalam literatur lain disebutkan bahwa tahun tersebut merupakan waktu dimana Raja Gowa mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil di Samawa, H Manggakang Raba dan A Latief Madjid, *Mengabdikan pada Tana Samawa*. Selanjutnya dalam J Noorduyn, *Sejarah Sumbawa*, disebutkan bahwa proses Islamisasi Sumbawa terjadi sekitar tahun 1620 di bawah pe-

* Penelitian dengan judul tersebut dilakukan oleh tim peneliti yang beranggotakan Septi Satriani (koordinator), Irine Hiraswari Gayatri, Heru Cahyono, dan Yogi Setya Permana.

dimana Raja Gowa I Mangari Daeng Manrabia Sultan Alauddin Tuminanga ra Gaukanna memberikan keistimewaan kepada Sumbawa untuk mempertahankan adat dan rapang Kerajaan Sumbawa dengan syarat Kerajaan Sumbawa mau beriman kepada Allah SWT tentulah menciptakan polah tingkah elite bangsawan yang berbeda dengan masa ketika Kerajaan Sumbawa berada di bawah VOC pada tahun 1667⁴ meskipun demi memudahkan masuknya semua kerajaan taklukan Gowa dalam jaringan kekuasaan Belanda, Belanda menjanjikan hal yang sama kepada Sumbawa.⁵

Begitu pula ketika struktur politik nasional mengalami perubahan sebagai akibat berakhirnya masa kepemimpinan Soeharto maka implikasi yang terjadi adalah perubahan begitu rupa pada struktur dan kehidupan elite baik nasional maupun di tingkat lokal.⁶ Masa ini ditandai dengan

ngaruh dan kekuasaan Kerajaan Makasar atas kekuasaan politik dan kebudayaan Sumbawa yang kuat sehingga terjalinlah hubungan yang cepat antara Sulawesi Selatan dengan Sumbawa. Menurut Speelman-Jenderal VOC yang mengalahkan Sultan Hasanuddin, Sumbawa berada di bawah kekuasaan Makasar selama kurang lebih 47 tahun.

⁴ Lalu Manca, *Sumbawa Pada Masa Lalu: Suatu Tinjauan Sejarah*, (Surabaya: Penerbit Rinta, 1983), hlm. 67. Ini adalah tahun dimana Sultan Hasanuddin menandatangani Perjanjian Bongaya sebagai wujud penyerahannya kekuasaan Gowa terhadap VOC.

⁵ *Ibid*, hlm 62.

⁶ Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter, Laurence Whitehead, *Transisi Menuju Demokrasi, Tinjauan Berbagai Perspektif*, (LP3ES: Jakarta, 1993), hlm. 6. Larry J. Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation*, (Baltimore: John Hopkins University Press, 1999), hlm. 69. Aspinall dan Fealy (Ed.), *Local Power and Politics in Indonesia: Decen-*

surutnya sentralisasi dan terbukanya ruang bagi munculnya elite-elite baru dengan konteks politik yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya.⁷ Pada masa Orde Baru dimana kontrol begitu kuat dijalankan oleh Pusat atas elite lokal melalui jaringan militer dan birokrasi menyebabkan kepemimpinan lokal yang sudah berlangsung lama di daerah terkadang harus rela diganti dengan agen-agen dari jaringan kekuasaan rezim patrimonial.⁸ Berbeda dengan Orde Baru, masa transisi yang lazim juga disebut dengan era reformasi seakan menjanjikan sesuatu yang baru minimal dalam hal hak dan kekuasaan bagi daerah untuk bisa mengatur kehidupan daerahnya. Arena politik masa Orde Baru yang dahulu cenderung tertutup menjadi terbuka untuk diperebutkan oleh mereka-mereka yang ingin meraih kekuasaan terhadap sumber daya baik ekonomi, politik, sosial budaya maupun kekuasaan.

Untuk itulah kajian ini ingin menggambarkan bagaimana perubahan struktur yang ada mampu berpengaruh pada peran yang mesti diemban oleh elite lokal khususnya bangsawan. Pada bagian awal kajian digambarkan bagaimana perubahan struktur sejak jaman Kerajaan Sumbawa hingga menjelang kemerdekaan melahirkan peran dan strategi yang berbeda dari elite bangsawan. Bagian ini dirangkai dengan gambaran faktor-faktor yang menjadi penyebab elite bangsawan kurang bisa mempertahankan perannya sebagai akibat perubahan struktur maupun arena yang disebabkan setting politik di tingkat pusat maupun faktor internal dari diri elite bangsawan. Bagian selanjutnya berisi mengenai implikasi kemunduran elite bangsawan membawa pengaruh pada lahirnya elite-elite baru di luar elite bangsawan yang dirangkai dengan analisa teoritik

tralisation and Democratisation, (Singapura: Institute of Southast Asian Studies, 2003), hlm 2. Malley, "New Rules, Old Structures and the Limits of Democratic Decentralisation" dalam Aspinall dan Fealy (Ed.), *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*, (Singapura: Institute of Southast Asian Studies, 2003).

⁷ R Siti Zuhro, dkk, *Peran Aktor dalam Demokratisasi*, (Yogyakarta: Ombak, 2009).

⁸ Aspinall dan Fealy (Ed.), *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*, (Singapura: Institute of Southast Asian Studies, 2003), hlm 2. Malley, "New Rules, Old Structures and the Limits of Democratic Decentralisation" dalam Aspinall dan Fealy (Ed.), *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*, (Singapura: Institute of Southast Asian Studies, 2003).

atas berbagai perubahan struktur dan peran yang terjadi atas elite lokal di Sumbawa.

Untuk membongkai polah tingkah elite dalam berbagai struktur yang ada, kajian ini menggunakan pendekatan Pierre Bourdieu⁹ yang menggambarkan bahwa dunia sosial terdiri dari berbagai arena dimana di dalamnya terdapat struktur maupun aktor yang berjuang meraih apa yang menjadi keinginannya berbasis pada modal yang dimilikinya. Aktor-aktor ini mengekspresikan segala sesuatu yang dia peroleh sebagai wujud proses internalisasi atas budaya, sejarah dan nilai-nilai agama yang selama ini dihadapinya.¹⁰ Proses pewujudan internalisasi inilah yang melahirkan habitus atau kecenderungan yang bisa jadi berbeda pada setiap arena sebagai manifestasi perbedaan posisi yang dimilikinya. Posisi sangat tergantung pada arena dan modal yang dimiliki oleh aktor yang bersangkutan.

Pada masa Orde Baru ketika aktornya¹¹ cenderung "tunggal" dan proses konversi modal berjalan tiada henti dan berhasil diakumulasi dalam satu tangan maka aktor Orde Baru cenderung bisa mengontrol kekuasaan diri maupun masa depan orang lain. Melalui berbagai kebijakan, modal ekonomi dan politik dapat dipusatkan di dalam lingkaran elite-elite kroni Orde Baru. Dengan pola dominasi tersebut pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik dapat dilaksanakan tanpa tantangan yang berarti dari oposisi ataupun aktor-aktor di luar lingkaran elite kroni Orde Baru. Untuk memperkuatnya legitimasi ideologis dibangun melalui penciptaan asas tunggal Pancasila yang disosialisasi dan diinternalisasi melalui P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila). Pemusatan juga terjadi pada hubungan kekuasaan di arena pemerintahan antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah dan aktor-aktor yang berada di sekitar atau berasosiasi dengan tiga lingkaran

⁹ Richard Jenkins, *Pierre Bourdieu*, (London: The Taylor and Francis e-Library, 2006), hlm. 40-64. Muridan S Widjojo, "Strukturalisme Konstruktivis Pierre Bourdieu dan Kajian Sosial Budaya" dalam Irzanti dan Ari Anggari Harapan (Ed.), *Prancis dan Kita: Strukturalisme, Sejarah, Politik, Film, dan Bahasa*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2003), hlm. 35- 50.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 41.

¹¹ Dalam kalimat ini yang dimaksud aktor adalah penguasa Orde Baru yaitu Soeharto. Meskipun aktor yang bermain relatif banyak, Soeharto mampu mengontrolnya dan mempengaruhinya untuk tunduk pada berbagai kebijakan yang diberikannya.

inti Orde Baru (birokrasi, militer dan Golkar) di daerah menjadi subordinat kekuasaan di pusat. Modal sosial dalam bentuk hubungan dan patronase dengan elit-elit di pusat menjadi salah satu modal terpenting para elit daerah pada masa itu.

Pada masa Orde Baru, dunia sosial dan hubungan kekuasaan didominasi oleh aktor-aktor yang terbatas di lingkungan tertentu, yakni keluarga dan kroni presiden yang didukung oleh elite militer, elite birokrasi, dan Partai Golkar. Berbagai arena kehidupan dalam dunia sosial Orde Baru terutama yang menyangkut hubungan kekuasaan dapat dikontrol dengan efektif. Strategi terpenting yang terlihat jelas adalah pada eksklusi aktor-aktor di luar ketiga kelompok elit di atas. Orde Baru secara sungguh-sungguh mengontrol arena-arena strategis yang secara politik bernilai tinggi seperti Ormas, partai, dan universitas dengan menempatkan aparatusnya sebagai alat kontrol. Elemen-elemen penting dari masyarakat sipil dikontrol dan diminimalisasi perannya pada pelayanan kepentingan kekuasaan Orde Baru. Aktor sosial dan politik lainnya yang mungkin akan menantang dan merongrong dominasi kekuasaan Orde Baru secara efektif dapat disingkirkan atau setidaknya dimarginalisasi. Hukum dan peraturan dibangun dan ditegakkan sesuai dengan kepentingan pelestarian kekuasaan ketiga unsur dominan tersebut di atas. Dunia sosial Orde Baru semacam ini mampu bertahan lebih dari 30 tahun.

Kronik Tana Samawa

Seperti yang telah diuraikan dalam pengantar tulisan ini, bagian ini menggambarkan bagaimana perubahan peran elite bangsawan dalam berbagai masa sebagai akibat perubahan struktur/kebijakan kekuasaan yang membingkainya. Bangsawan dalam Tana Samawa¹² adalah mereka-mereka yang karena garis keturunannya dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan oleh golongan *dea-*

datu.¹³ Yang masuk dalam golongan ini adalah raja dan keluarganya termasuk orang-orang yang karena jasanya diberi gelar kebangsawanan. Untuk menilai tinggi rendahnya derajat kebangsawanan dilihat dari ikatan perkawinan dimana gelar *daeng* memiliki derajat kebangsawanan lebih tinggi dibanding *lalu/lala* maupun *dea*.¹⁴

Dalam sejarahnya, kehidupan pribadi dan pemerintahan keluarga Kerajaan Sumbawa ditopang oleh mereka-mereka yang karena posisinya dilekati fungsi dan kewajiban terhadap Raja dan Kerajaan.¹⁵ Raja menduduki posisi tertinggi dalam hirarki pemerintahan dan dalam menjalankan pemerintahannya dia dibantu oleh Menteri Telu, Mamanca Lima dan Lelurah Pitu. Secara teritorial Kerajaan Sumbawa dibagi ke dalam daerah ibukota kerajaan yang dibagi ke dalam empat wilayah karang dimana masing-masing karang (pintu) dikepalai oleh keluarga kerajaan jika mendasarkan pada gelar *dea* yang dimilikinya yaitu Lempi di bawah *Dea Longan Lempi*; Brangbara di bawah *Dea Kademungan*; Semawa Puwen di bawah *Dea Longan Semawa Puwen* dan Lawang Seketeng di bawah *Datu Busing*.¹⁶ Semetara itu, daerah di luar ibukota

¹³ Lalu Manca, *Sumbawa Pada Masa Lalu*, Op.Cit., hlm. 28. Sistem ini mengakui individu sebagai anggota familinya disebabkan oleh darah keturunan yang sama dengan ayah atau ibunya.

¹⁴ Seorang bangsawan lajang baik laki-laki maupun perempuan disebut dengan gelar *daeng* sementara ketika sudah menikah disebut dengan *datu*. Perkawinan yang dijalin antara *datu* dengan *datu* melahirkan gelar *daeng*, tetapi jika *datu* melakukan perkawinan dengan seorang yang memiliki stratifikasi yang tidak sederajat maka melahirkan gelar *lalu* untuk laki-laki dan *lala* untuk perempuan. Dan kelak jika *lalu* menikah dengan orang dari golongan *sanak* maka dia berhak menyangand gelar *dea*.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 77-82. Dalam stratifikasi sosial masyarakat Samawa, setelah bangsawan ada golongan yang disebut dengan *Tau Sanak* yang didasarkan pada fungsi kerjanya dibagi ke dalam *Tau Marisi-orang* yang menggantungkan hidupnya dari tana ulayat. Sementara *Tau Juran* sama dengan *Tau Marisi* dalam soal menggantungkan hidup dari tana ulayat. Hanya saja yang membedakan dengan *Tau Marisi* adalah dalam soal tempat tinggal karena *Tau Juran* adalah mereka-mereka yang tinggal di empat wilayah juran milik Kerajaan Sumbawa. Sementara *Tau Kamutar* adalah orang-orang yang memiliki fungsi kerja domestik Kerajaan Sumbawa dan khusus yang mengurus persoalan menyusui anak-anak Kerajaan Sumbawa disebut *Tau Panising*. Golongan terakhir dari Kerajaan Sumbawa adalah ulin abdi atau budak.

¹⁶ Helius Sjamsuddin, "Perubahan Politik di Pulau Sumbawa: Kesultanan Bima dan Sumbawa (1815-1950)". Seminar Sejarah Nasional IV, 16-19 Desember 1985. hlm. 5.

¹² Tana Samawa adalah nama lain dari Sumbawa. Dalam sejarahnya Tana Samawa dihuni oleh suku Su mbawa yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*) dimana turun menurun dari generasi ke generasi merupakan masyarakat hukum *genealogisch territorial* dengan sistem parental dalam arti mempunyai nenek moyang dari pihak ayah dan ibu. Lalu Manca, *Sumbawa Pada Masa Lalu dalam Tinjauan Sejarah*, (Surabaya: Penerbit Rinta, 1983), hlm 27-29.

kerajaan 10 kekuasaan atau *penganton* tidak termasuk tiga kerajaan vasal Seran¹⁷, atau Setelok, Taliwang dan Jereweh.¹⁸ Masing-masing *penganton* dikepalai oleh *otak penganton* yang terdiri dari Dea Ranga, Dea Kalibela, Datu Busing, Dea Longan Semawa Puwen, Dea Bawa, Dea Mangku, Dea Ngaru, Bumi Ngampo, Demung Kroya, dan Demung Mapin.¹⁹

Struktur kekuasaan Kerajaan Sumbawa yang cukup rumit ini menjadi dasar peran elite bangsawan beserta berbagai golongan yang ada di dalam Kerajaan Sumbawa. Meski memiliki struktur yang rumit namun elite bangsawan mampu “menguasai” arena karena penguasaan atas berbagai modal yang ada masih berada dalam genggaman bangsawan beserta keluarganya. Perkawinan masih terjaga dalam hubungan yang relatif tertutup dalam lingkungan dea-datu sehingga kohesivitas petalian darah di antara bangsawan masih relatif terjaga.

Hal ini berbeda ketika Kerajaan Sumbawa ditaklukan oleh Kerajaan Gowa. Meskipun struktur kekuasaan relatif tidak berubah kecuali beberapa peran tambahan bagi Raja dan keluarganya (bangsawan) seperti membayar upeti, mengiri rombongan Raja dari Kerajaan Gowa, mengumpulkan kayu sebang, membantu mendirikan benteng, membantu melawan musuh kerajaan dan beberapa kewajiban lainnya, namun hubungan pertalian darah diantara bangsawan mulai “longgar” sebagai akibat perkawinan politik yang dijalankan oleh keluarga Kerajaan Sumbawa dengan Kerajaan Gowa. Perkawinan ini sengaja dilakukan sebagai strategi dari Kerajaan Gowa untuk penetrasi dalam arena yang telah dikuasai oleh raja beserta keluarganya dan di lain sisi strategi Kerajaan Sumbawa untuk mendapatkan hubungan yang lebih “lunak” dengan daerah penakluk.

Ketika Kerajaan Gowa sebagai atasan Kerajaan Sumbawa mengalami kekalahan melawan VOC maka Kerajaan Sumbawa kemudian beralih menjadi daerah jajahan VOC. Masa ini raja dan bangsawan semakin sulit untuk mengontrol

¹⁷ Aries Zulkarnain, *Karakteristik Kepemimpinan dalam Adat dan Rappang Tana Samawa*, (Sumbawa Besar: Lembaga Adat Tana Samawa, 2008), hlm. 18.

¹⁸ Helius Sjamsuddin, “Perubahan Politik...”, *Op.Cit.*, hlm 5.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 5.

arena dan modal kekuasaannya. Arena yang ada cenderung lebih tertutup karena semua berada di bawah pengawasan VOC. VOC melancarkan strategi pecah belah untuk memporakporandakan kohesivitas bangsawan. Selain itu bangsawan hanya digunakan sebagai ‘alat’ kekuasaan untuk memenuhi hasrat VOC menguasai perdagangan dan meraup keuntungan. Perampasan jalur dan monopoli perdagangan atas berbagai komoditi milik Kerajaan Sumbawa semakin membuat keterbatasan kepemilikan modal bangsawan. Kebijakan yang dijalankan oleh VOC sedikit demi sedikit mampu melonggarkan arena yang dahulu hanya semata-mata milik bangsawan saja.

Pendudukan VOC dan Belanda membawa pengaruh yang cukup besar pada eksistensi Kerajaan Sumbawa.²⁰ Perubahan pola wilayah maupun struktur kekuasaan atas Kerajaan Sumbawa berpengaruh pada kehidupan Kerajaan Sumbawa secara keseluruhan. Pola pembagian berdasarkan tugas dan fungsi seseorang (*dea datu, sanak, tau marisi, tau juran, tau kamutar, ulin abdi*) menjadi kehilangan pijakan. Keberadaan Kerajaan Sumbawapun telah mengalami perubahan seiring berubahnya status Kerajaan Sumbawa dari daerah yang berdaulat menjadi daerah di bawah kekuasaan Belanda. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Jalaluddin III, Kerajaan Sumbawa dibagi ke dalam dua *Onderafdeling* di bawah karesidenan Timor. Selain itu, penghapusan jabatan menteri²¹ yang kemudian diganti dengan *ambtenar*²² merupakan titik awal Kerajaan Sumbawa bersinggungan dengan pola negara modern.

Selain perubahan pola kepemimpinan yang tidak lagi sentral di tangan Kerajaan sebagai akibat perubahan bentuk wilayah kerajaan, pada masa itu ditandai pula oleh munculnya berbagai sekolah dan madrasah di Sumbawa yang kemudian hari membawa pengaruh yang cukup besar

²⁰ Eksistensi Kerajaan Sumbawa di sini dibaca sebagai eksistensi seluruh struktur kerajaan bersama isinya termasuk keluarga atau keberadaan bangsawan, struktur pemerintahan maupun kebiasaan-kebiasaan yang selama ini berlaku di dalamnya.

²¹ Manggaukang Raba, *A. Latif Madjid: Mengabdikan Tana Samawa*, (Sumbawa: tanpa penerbit, 2002), hlm. 753.

²² Dalam Kamus Bahasa Belanda, *ambtenaar* berarti pejabat, pegawai atau pegawai negeri. <http://levensgenieter.be/kamus/results.cfm?pref=IND>.

pada kehidupan politik di Sumbawa.²³ Mereka yang memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah ini kemudian meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi di Jawa. Kepergian mereka ke Jawa untuk sekolah tidak saja mengubah pola berpikir mereka secara akademis tetapi juga pemikiran secara politik. Selain itu, keberadaan mereka-mereka yang mengenyam pendidikan di Jawa ini mampu menggeser pola dominasi keluarga bangsawan dan eksistensi Kerajaan Sumbawa yang cenderung dianggap negatif karena kedekatan mereka pada Belanda.

Meredupnya Peran Politik Bangsawan di Masa Sekarang

Kondisi yang mengerosi peran politik bangsawan tidak berhenti hanya sampai menjelang kemerdekaan. Mulai dari modernisasi bentuk kenegaraan, keluarnya kebijakan atas tanah melalui undang-undang agraria, penghapusan gelar kebangsawanan dan lain-lainnya menjadi faktor-faktor yang menambah laju kemunduran peran politik bangsawan. Bahkan momentum runtuhnya Soeharto dari kepemimpinan nasional dan menghadirkan berbagai kesempatan bangkitnya kembali sentimen primordial berbasis adat istiadat, tanah, komunitas pun tidak mampu dimanfaatkan oleh elite bangsawan di Sumbawa.²⁴

Pada hal cerita kesuksesan kembalinya para bangsawan di ranah politik pasca Soeharto banyak menghiasi politik lokal di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya. Meski pada masa Soeharto-pun kesultanan Yogyakarta tidak kurang akal untuk mempertahankan eksistensi kekuasaannya, pada masa setelahnyapun Kesultanan ini termasuk di antara sekian kekuatan aristokrasi yang mencoba mempertahankan eksistensinya dalam ranah politik di Indonesia.²⁵ Sepertinya cerita-cerita kesuksesan

kaum bangsawan ini tidak juga mampu menggugah keinginan bangsawan Sumbawa untuk mendulang cerita yang sama. Hal ini tergambar ketika bangsawan mencoba peruntungan dalam kontestasi pilkada Sumbawa 2010 bangsawan, yang terepresentasikan dalam diri Daha Madi-laoe, justru enggan mengungkit darah biru yang mengalir dalam dirinya.

Berbagai faktor baik internal maupun eksternal menjadi pemicu mengapa peran politik bangsawan Sumbawa begitu terpuruk. *Pertama*, sikap politik Sultan Kaharudin III untuk melebur secara utuh ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghapus secara formal Kerajaan Sumbawa justru membawa kerugian yang begitu besar pada keberadaan Kerajaan Sumbawa belakangan. Meskipun sikap politik ini tentulah dilakukan untuk “menyelamatkan” posisi Kerajaan Sumbawa yang sempat ternodai reputasinya akibat kedekatan dengan Belanda. Sultan Kaharudin III benar-benar ingin membersihkan citra bangsawan yang lekat dengan praktek feodalisme dengan jalan menghapuskan perbudakan yang erat dengan kehidupan kaum bangsawan. Penghapusan perbudakan ini disertai dengan penghapusan gelar bangsawan. Metode pencakokan struktur yang tersisa dari Kerajaan Sumbawa ke dalam negara modern Indonesia membawa konsekuensi hapusnya logika keturunan yang selama ini melekat dalam sirkulasi kepemimpinan Kerajaan Sumbawa karena logika ini harus digantikan dengan logika meritokrasi dan kemampuan.

Kedua, konsekuensi dari pengakuan kekuasaan Indonesia oleh Kerajaan Sumbawa menjadikan Kerajaan Sumbawa tunduk pada segala peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu peraturan perundangan milik Negara Indonesia yang membawa kerugian pada hilangnya kepemilikan tanah seluas 37 ribu meter persegi yang selama ini menjadi basis modal legitimasi kekuasaan Kerajaan Sumbawa adalah diberlakukannya undang-undang *land reform*. Jika dahulu hubungan antara masyarakat dan bangsawan dijalin dalam hubungan ketergantungan melalui tanah garapan milik kerajaan

atau kesultanan di daerah yang pamornya naik kembali, sepuluh kerajaan bangkit kembali, dan enam kerajaan mengalami penggalian kembali.

²³ Burhan Djabier Magenda, *The Surviving of Aristocracy in Indonesia*, UMI Dissertation Information Service, (Michigan: University Microfilm International, A Bell and Howell Information Company 300 N Zeeb Road, Ann Arbor, Michigan 48106:1989), hlm. 343.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 18.

²⁵ Hadiz, “Power and Politics in North Sumatra: The Uncompleted Reformasi”, dalam Aspinall dan Fealy (Ed.), *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*, (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2003), hlm. 174. Gerry Van Klinken mencatat ada delapan kerajaan

bagi masyarakat maka dengan hilangnya tanah-tanah ini membuat kerajaan beserta keluarganya kehilangan pengaruh terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada tanah milik kerajaan.

Ketiga, citra buruk keluarga bangsawan yang dekat dengan Belanda begitu melekat di benak masyarakat dan sulit hilang dalam waktu yang cepat. Apalagi citra buruk ini dikonstruksi begitu rupa sehingga proses internalisasinya masih berlangsung hingga kontestasi pilkada 2010.

Keempat, lemahnya sumber daya manusia sebagai akibat warisan budaya mempo di masa lalu. Budaya yang membuai bangsawan karena menempatkannya pada zona nyaman dan cenderung “mematikan” kepekaan untuk lebih agresif dan survive terhadap hidup dan kehidupan. Mempo sendiri berarti mendudukan, salah satu strategi yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa untuk membuat Kerajaan Sumbawa “pasif” dan menerima posisi yang telah disuratkan oleh Kerajaan Gowa. Kondisi yang sama terjadi ketika beberapa bangsawan memilih bersikap “pasif” menghadapi kecilnya kemungkinan kembali eksis dalam kehidupan politik Sumbawa kontemporer.

Kelima, konflik internal warisan masa lalu. Kondisi struktur kekuasaan yang rumit di masa lalu melahirkan konflik tersendiri dalam tubuh Kerajaan Sumbawa. Kerajaan Sumbawa yang kekuasaannya juga ditopang oleh tiga daerah vasal dalam rentetan sirkulasi kepemimpinan kekuasaan tidak jarang diwarnai oleh konflik yang melibatkan negara vasal tersebut. Konflik ini ternyata masih membekas dan membentuk polarisasi di antara kaum bangsawan sendiri hingga saat ini.

Keenam, terdapat berbagai kondisi yang semakin menjauhkan masyarakat akan keberadaan bangsawan. Salah satunya disebabkan oleh bangsawan sendiri yang memilih untuk tinggal dan menghabiskan hidupnya jauh dari tanah kelahirannya. Ketidakhadiran orang-orang yang dianggap sentral dan mampu mewakili tokoh bangsawan membuat masyarakat semakin kehilangan memori siapa itu bangsawan Sumbawa.

Ketujuh, hilangnya kohesivitas dalam diri bangsawan Sumbawa. Hal ini tercermin dalam

cairnya orientasi politik kaum bangsawan. Bangsawan tidak memiliki satu visi dan sikap dalam menghadapi politik masa kini.

Munculnya Elite Lokal Baru

Berbagai hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi meredupnya peran politik bangsawan membuahkonsekuensi lahirnya elite baru. Momentum penting lahirnya elite baru ditandai oleh meleburnya Kerajaan Sumbawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa peleburan ini diikuti oleh berbagai sikap yang semakin menggerus posisi elite bangsawan di Sumbawa. Sikap untuk mengakui kekuasaan NKRI yang dikeluarkan oleh Kerajaan Sumbawa, yang dalam hal ini dilakukan oleh Sultan Kaharudin III, membuat Jakarta memiliki semacam kebebasan untuk menerapkan berbagai kebijakannya kepada Sumbawa atas nama Negara Indonesia.

Diserhakkannya sirkulasi kepemimpinan tertinggi di wilayah Kabupaten Sumbawa dalam mekanisme pasar mengakibatkan Sumbawa menjadi daerah terbuka bagi elite manapun untuk duduk dalam singgasana kepemimpinan kabupaten Sumbawa. Kondisi ini terus berlangsung ketika Indonesia memasuki fase Orde Baru. Orde yang trauma dengan kondisi politik orde sebelumnya yang mewarisi instabilitas karena terlalu membuka ruang bagi lahirnya berbagai kekuatan politik ini memilih untuk melakukan pembatasan bidang kehidupan yang menyangkut politik. Semua struktur kekuasaan ditata sedemikian rupa dalam satu tingkat komando dari atas hingga ke bawah dari Sabang sampai Merauke guna menjamin stabilitas politik sebagai prasyarat pembangunan ekonomi bisa terwujud.

Orde Baru sengaja membuat setting politik yang memungkinkan hanya orang-orang yang mendapat restu dari penguasalah yang dapat duduk dalam jajaran kekuasaan di seluruh Indonesia. Orde Baru juga melakukan pembatasan pada jumlah partai politik yang ada. Partai politikpun tidak sepenuhnya mampu memainkan peran sebagai penyeimbang kekuasaan (oposisi) karena kebijakan fusi partai maupun *floating mass* yang dijalankan. Dengan dibantu oleh

militer dan birokrasi, roda kekuasaan Orde Baru dijalankan untuk menggaransi bahwa semua berjalan dalam koridor yang telah ditentukan.

Kemampuan kekuasaan Orde Baru yang ditopang oleh Partai Golkar, birokrasi pemerintahan di bawah naungan Korps Pegawai Republik Indonesia maupun militer membawa konsekuensi pada kuatnya dominasi birokrasi dalam kehidupan politik Sumbawa. Mereka yang duduk dalam birokrasi mampu memainkan peran penting dan menumpuk modal serta jaringan yang kuat untuk mendominasi konstelasi elit di Sumbawa. Putusnya mata rantai birokrasi sebagai akibat purna tugas seorang birokrat di Sumbawa tidak serta-merta memutus kemungkinan mereka untuk menguasai bidang garapan lain di Sumbawa. Posisi-posisi penting dalam organisasi sosial kemasyarakatan, kepemimpinan partai politik, keanggotaan dalam legislatif maupun kontestasi pilihan bupati banyak diwarnai oleh para birokrat. Seperti yang terlihat dalam pertarungan pilkada Sumbawa 2010, dari tujuh pasangan calon bupati-wakil bupati mayoritas berlatar belakang pejabat birokrasi. Sementara keluarga bangsawan diwakili oleh calon wakil bupati pasangan nomor urut 5 dan 7 yakni Dharmawaty Madilaoe dan Sudirman Indra. Dharmawaty (Daha) adalah putri mantan Bupati Sumbawa Madilaoe ADT sedangkan Sudirman Indra adalah Pembantu Rektor ITN Malang. Selain itu dominasi birokrat dalam politik Sumbawa terlihat pada penguasaan partai Golkar dalam lembaga legislatif di Sumbawa periode 1997-1999, 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014.

Dominasi birokrat dan lemahnya daya kompetensi dalam peta perpolitikan di Sumbawa selain disebabkan oleh berbagai kebijakan yang menguntungkan posisi birokrat, juga sebagai akibat berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang menjadikan bangsawan kurang memiliki kesempatan untuk mengembangkan jaringan maupun modal mereka. Akibat keterbatasan pendidikan, lekatnya kesan negatif warisan masa lalu, hingga sisi moral yang kurang mendapat simpati semakin membuat kondisi bangsawan terpuruk dalam kehidupan politik di Sumbawa.

Pergeseran Elite dan Demokrasi Lokal di Sumbawa

Seperti telah dijelaskan dalam pengantar tulisan ini bahwa pendekatan yang digunakan untuk melihat pergeseran aktor/elite dalam politik di Sumbawa adalah milik Pierre Bourdieu yang melihat pentingnya relasi antara habitus, arena, dan praktek sosial.²⁶ Letak keunikan dari pendekatan ini adalah bahwa dinamika yang terjadi di dalamnya merupakan gambaran pertarungan antara berbagai pihak dimana ujung pertarungan tersebut akan menghasilkan perubahan, penjungkirbalikan atau justru penetapan/pengokohan posisi-posisi yang telah terbentuk sebelumnya.²⁷ Kesemuanya sangat tergantung pada arena, aktor yang bermain, maupun modal yang dimiliki oleh aktor-aktor tersebut.

Elite atau aktor disini dianggap sebagai agen yang mampu melakukan perubahan melalui tindakan yang mereka jalankan. Bahkan tindakan merekapun bisa jadi merupakan wujud respon atau justru resistensi atas kondisi yang ada sebelumnya. Tetapi tindakan-tindakan ini sangat bergantung pada modal sosial dan ekonomi yang mereka miliki.

Telah digambarkan pada bagian sebelumnya bahwa habitus elite bangsawan pada masa Kerajaan Sumbawa sangat berbeda jauh dengan masa ketika logika modernitas harus bersentuhan negara bangsa Indonesia. Dahulu keturunan darah sebagai sesuatu yang *given* dan tidak bisa diganggu gugat oleh mereka-mereka yang ingin masuk dalam arena kekuasaan pada jaman Kerajaan Sumbawa masih berjaya. Tetapi dewasa ini sebaliknya keturunan darah bangsawan bukan jaminan bagi seseorang untuk bisa mendapatkan pengakuan kekuasaan jika tidak memiliki kapabilitas, modal maupun dukungan politik baik dari partai, parlemen, maupun konstituen/pemilih.

²⁶ Muridan S. Widjojo, "Strukturalisme Konstruktivis Pierre Bourdieu dan Kajian Sosial Budaya, dalam Irzanti dan Ari Anggari Harapan (Ed.), *Perancis dan Kita, Strukturalisme, Sejarah, Politik, Film, dan Bahasa*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2003), hlm. 48. Lihat juga, Moishe Postone, Edward LiPuma, dan Craig Calhoun, "Introduction: bBourdieu and Social Theory", dalam Craig Calhoun, Edward LiPuma, Moishe Postone, ed., *Bourdieu, Critical Perspectives*, (Chicago: The University of Chigago Press, 1993), hlm. 1-12; Edward LiPuma, "Culture and the Concept of Culture in a Theory of Practice", dalam *ibid.*, hlm. 14-34.

²⁷ Muridan S. Widjojo, *ibid.*, hlm., 49.

Pilihan dari elite bangsawan untuk memilih tidak menggunakan label kebesaran bangsawanpun adalah wujud strategi bangsawan untuk menghadapi arena yang telah jauh berubah ketika bangsawan menjadi penanda penting dalam pertarungan kekuasaan politik. Bangsawan di sini sengaja membentuk habitus baru dengan menghilangkan batas yang selama ini membedakan kelas mereka dengan orang kebanyakan. Dengan menanggalkan label bangsawan diharapkan mampu memperluas segmentasi pemilih dan menghindari konfrontasi terbuka dengan elite bangsawan lain yang tidak begitu menyukai politik dan memilih menjauh dari dunia politik.

Selain itu, masuknya Daeng Ewan sebagai salah satu kandidat yang gagal maju dalam kontestasi pilkada karena kekurangan dukungan dalam lembaga adat tana samawa adalah bagian dari strategi baru yang dia lakukan menghadapi kompleksitas arena dan keterbatasan modal yang dimilikinya. Akhirnya pergeseran elite lokal dalam politik di Sumbawa membawa warna tersendiri dalam kehidupan demokrasi lokal di Sumbawa. Kesempatan bagi tumbuhnya elite penyeimbang di luar elite dominan (birokrasi) perlu terus dilakukan agar ada kekuasaan penyeimbang dan pengontrol bagi jalannya roda demokrasi lokal di Sumbawa.

Daftar Pustaka

- Anwar, Dewi Fortuna. "Demokrasi Lokal: Peran Aktor Dalam Mendorong dan Menghambat Demokratisasi", dalam R Siti Zuhro (Ed.). 2009. *Peran Aktor dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Ombak.
- Aspinall dan Fealy (Ed.). 2003. *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*. Singapura: Institute of South-east Asian Studies.
- Diamond, Larry J. 1999. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Jenkins, Richard. 2006. *Pierre Bourdieu*. London: The Taylor and Francis e-Library.
- Magenda, Burhan Djabier. *The Surviving of Aristocracy in Indonesia*, UMI Dissertation Information Service. Michigan: University Microfilm International, A Bell and Howell Information Company 300 N Zeeb Road, Ann Arbor, Michigan 48106:1989.
- Malley. 2003. "New Rules, Old Structures and the Limits of Democratic Decentralisation" dalam Aspinall dan Fealy (Ed.). *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*. Singapura: Institute of South-east Asian Studies.
- Manca, Lalu. 1983. *Sumbawa pada Masa Lalu: Suatu Tinjauan Sejarah*. Surabaya: Penerbit Rinta.
- Muridan S Widjojo. 2003. "Strukturalisme Konstruktivis Pierre Bourdieu dan Kajian Sosial Budaya" dalam Irzanti dan Ari Anggari Harapan (Ed.). *Prancis dan Kita: Strukturalisme, Sejarah, Politik, Film, dan Bahasa*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Norrdun, J. 2002. *Sejarah Sumbawa*. Sumbawa Besar: tanpa nama penerbit.
- _____. "Makassar and the Islamization of Bima", makalah dalam 10th Conference of the IAHA di Singapura, 27-30 Oktober 1986.
- O'Donnell, Guillermo, Philippe C.Schmitter, Laurence Whitehead. 1993. *Transisi Menuju Demokrasi, Tinjauan Berbagai Perspektif*. LP3ES: Jakarta.
- Raba, Manggaukang. 2002. *A. Latif Mudjid: Mengabdikan Tana Samawa*. Sumbawa: tanpa penerbit.
- Sjamsuddin, Helius. "Perubahan Politik di Pulau Sumbawa: Kesultanan Bima dan Sumbawa (1815-1950)", Seminar Sejarah Nasional IV. 16-19 Desember 1985.
- Zuhro, R Siti, dkk. 2009. *Peran Aktor dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Ombak.
- Zulkarnain, Aries. 2008. *Karakteristik Kepemimpinan dalam Adat dan Rappang Tana Samawa*. Sumbawa Besar: Lembaga Adat Tana Samawa.